



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022-2026
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2023 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, terdapat beberapa data kinerja yang perlu disesuaikan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka Indikator Kinerja Utama yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022, perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2022-2026 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No.9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang- Undang No.27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 22 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022-2026 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2022-2026 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 32), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,



SUROSU, SE

Pembina TK.I/IVb

NIP. 197003101993031008

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 18 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

RISDIANTO

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 18 Oktober 2023

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BULUNGAN

NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2022 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022-2026 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022-2026 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI BERIKUT:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Penjelasan / formulasi penghitungan
Misi 1 : Mewujudkan Kedaulatan Pangan yang Berbasis Kearifan Lokal				
1.	Mewujudkan Peningkatan Produktifitas Pertanian	Peningkatan Produksi Pertanian	Kemampuan atau daya dukung lahan pertanian dalam memproduksi tanaman	Produktifitas tahun n - Produktifitas tahun n-1 : Produktifitas tahun n-1 x 100
2.	Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani	Perbandingan antara Indeks harga yg diterima petani (It) dengan Indeks harga yg dibayar petani (Ib)	$NTP = \frac{I_t}{I_b} \times 100\%$ It : Indeks harga yang diterima petani Ib : Indeks harga yang dibayar petani NTP : Nilai Tukar Petani

3.	Meningkatnya ketersediaan dan keanekaragaman pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan	<p>Total skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dikenal dengan kualitas konsumsi pangan adalah jumlah dari skor 9 kelompok pangan, yaitu jumlah dari kelompok padi-padian sampai dengan skor kelompok lain-lain. Angka ini disebut skor PPH konsumsi pangan, yang menunjukkan tingkat keragaman konsumsi pangan.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Skor PPH = skor PPH kelompok padi-padian + umbi-umbian ++ skor PPH kelompok lain-lain.</p> </div>
		Stok Cadangan Pangan	Nilai cadangan pangan yang dikelola Pemerintah daerah untuk mengatasi kondisi rawan pangan	80 % x jml cppd provinsi x jml penduduk kab/jml penduduk provinsi
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berkarakter dan Berdaya Saing				
4.	Meningkatnya Aksesibilitas Dan Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Alat untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia berdasarkan kemampuan baca tulis dan rata-rata tahun bersekolah	<p>Tingkat Pengetahuan:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> $I_{pengetahuan} = \frac{I_{HLS} - I_{RLS}}{2}$ </div> <p>Keterangan:</p> <p>$I_{pengetahuan}$: Indeks Pengetahuan</p> <p>I_{HLS} : Indeks Harapan Lama Sekolah</p> <p>I_{RLS} : Indeks Rata-rata lama sekolah</p>
5.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Alat untuk menilai keberhasilan pelayanan kesehatan berdasarkan tingkat mortalitas (kematian), mordibitas (kesakitan), dan fertilitas (kelahiran).	<p>Tingkat Kesehatan:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> $I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{max} - AHH_{min}}$ </div> <p>Keterangan:</p> <p>$I_{kesehatan}$: Indeks kesehatan</p> <p>AHH : Angka harapan hidup</p> <p>AHH_{min} : Angka harapan hidup minimal</p> <p>AHH_{max} : Angka harapan hidup maksimal</p>

6.	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender	Indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki.	$IPG = \frac{IPM_{perempuan}}{IPM_{Laki-laki}}$																						
7.	Meningkatnya Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Mengukur pencapaian aktivitas di daerah dalam memanfaatkan potensi dengan mengoptimalkan ekosistem, potensi iptek, dan inovasi untuk menciptakan daya saing dan kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan	<table border="1" data-bbox="1796 391 2369 578"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Klasifikasi Intensitas</th> <th colspan="2">Indikator</th> <th rowspan="2">Nilai</th> </tr> <tr> <th>Positif</th> <th>Negatif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tinggi</td> <td>$I \geq \bar{u} + SD$</td> <td>$I \geq \bar{u} - SD$</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Sedang</td> <td>$\bar{u} \leq I < \bar{u} + SD$</td> <td>$\bar{u} - SD \leq I < \bar{u}$</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Rendah</td> <td>$\bar{u} - SD \leq I < \bar{u}$</td> <td>$\bar{u} < I \leq -SD$</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Sangat Rendah</td> <td>$I < \bar{u} - SD$</td> <td>$I < \bar{u} - SD$</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1796 597 2282 727"> Dimana: I = Nilai Indikator u_i = Nilai ke i \bar{u} = nilai rata-rata SD = Standar Deviasi $SD = \sqrt{\frac{\sum(u_i - \bar{u})^2}{(n-1)}}$ </p>	Klasifikasi Intensitas	Indikator		Nilai	Positif	Negatif	Tinggi	$I \geq \bar{u} + SD$	$I \geq \bar{u} - SD$	3	Sedang	$\bar{u} \leq I < \bar{u} + SD$	$\bar{u} - SD \leq I < \bar{u}$	2	Rendah	$\bar{u} - SD \leq I < \bar{u}$	$\bar{u} < I \leq -SD$	1	Sangat Rendah	$I < \bar{u} - SD$	$I < \bar{u} - SD$	0
Klasifikasi Intensitas	Indikator		Nilai																							
	Positif	Negatif																								
Tinggi	$I \geq \bar{u} + SD$	$I \geq \bar{u} - SD$	3																							
Sedang	$\bar{u} \leq I < \bar{u} + SD$	$\bar{u} - SD \leq I < \bar{u}$	2																							
Rendah	$\bar{u} - SD \leq I < \bar{u}$	$\bar{u} < I \leq -SD$	1																							
Sangat Rendah	$I < \bar{u} - SD$	$I < \bar{u} - SD$	0																							
Misi 3 : Memantapkan Infrastruktur Sebagai Pendukung Utama Pengembangan Ekonomi Rakyat dan Pelayanan Dasar Masyarakat																										
8.	Terwujudnya peningkatan kualitas prasarana dan sarana wilayah yang terintegrasi	Persentase cakupan infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung pengembangan ekonomi	Infrastruktur pelayanan dasar terdiri dari: 1. Sarpras irigasi kondisi baik 2. Sarpras air minum terakses Infrastruktur pengembangan ekonomi terdiri dari: 1. Jalan kondisi mantab 2. Jembatan kondisi baik 3. Drainase kondisi baik. Dihitung berdasarkan cakupan pada masing-masing komponen prasarana dan sarana wilayah	Nilai rata-rata dari cakupan infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung pengembangan ekonomi																						

9.	Meningkatnya pengelolaan Kawasan permukiman layak	Persentase kawasan permukiman yang layak	Kawasan lingkungan tempat tinggal sekaligus tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.	Jumlah Pemukiman yang layak: Jumlah Pemukiman x 100
10.	Meningkatnya peluang kerja dan lapangan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja	$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$
11.	Meningkatnya pendapatan daerah	Persentase Peningkatan PAD	Persentase peningkatan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Realisasi PAD (t) - Realisasi PAD(t-1) / Realisasi (t-1) x 100 Keterangan : PAD (t) = PAD tahun berjalan PAD (t-1) = PAD tahun sebelumnya
12.	Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN	Realisasi investasi di daerah	Realisasi investasi adalah nilai kegiatan investasi baik PMDN maupun PMA untuk melakukan usaha di Kabupaten Bulungan	$PV = C1 / (1+r)$ C1 = uang yang akan diterima di tahun ke-1 r = Discount rate / opportunity cost of capital Tingkat pengembalian / hasil investasi (%) dari investasi yang sebanding $NPV = Co + (C1 / (1+r))$ Co = Jumlah uang yang diinvestasikan (karena ini adalah pengeliraran, maka menggunakan bilangan negatif)

13.	Meningkatnya pariwisata yang berbasis budaya lokal	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	Jumlah wisatawan domestik maupun internasional yang berkunjung di Kabupaten Bulungan	Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bulungan
		Persentase objek pemajuan kebudayaan Kabupaten Bulungan yang dilestarikan	Persentase objek kebudayaan dalam meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya daerah di tengah peradaban melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan/Jumlah objek pemajuan kebudayaan x 100
Misi 4 : Memajukan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) yang Ramah Lingkungan				
14.	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Kualitas lahan adalah karakteristik lahan yang ber-pengaruh langsung pada persyaratan dasar dari penggunaan lahan dan diharapkan dapat mempengaruhi kesesuaian lahan dengan tidak ter-gantung pada kualitas lahan yang lain	Luas Lahan Primer (LLP) + Luas Lahan Sekunder (LLS) : Luas Kawasan Lahan
		Indeks Kualitas Air (IKA)	Kualitas air adalah suatu ukuran kondisi air dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi, dan biologisnya. Kualitas air juga menunjukkan ukuran kondisi air relatif terhadap kebutuhan biota air dan manusia	

		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu atau tingkat kebaikan udara menurut sifat-sifat unsur pembentuknya. IKU merupakan gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter (indikator) individual polusi udara yang berhubungan menjadi suatu nilai sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat awam.	$I = \frac{I_a - I_b}{X_a - X_b} (X_x - X_b) + I_b$ <p>I = ISPU terhitung Xb = Ambien batas bawah Ia = ISPU batas atas Xa = Ambien batas atas Ib = ISPU batas bawah Xx = Kadar Ambien nyata hasil pengukuran</p>
15.	Menurunnya kemiskinan	Persentase penduduk miskin	Ukuran yang menunjukkan tingkat kemiskinan di suatu wilayah	$P_\alpha = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^\alpha$ <p>Z = Garis kemiskinan yi = rata-rata pengeluaran per kap sebulan yg berada dibawah garis kemiskinan q = jumlah penduduk hidup di bawah garis kemiskinan n = jumlah penduduk</p>
16.	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase Desa mandiri	Ukuran penilaian suatu desa	$IDM = 1/3 (IS \times IE \times IL)$ <p>Keterangan: IDM: Indeks Desa Membangun IS: Indeks Sosial IE: Indeks Ekonomi IL: Indeks Lingkungan</p>

Misi 5 : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Keuangan Daerah yang Sehat, dan Inovasi Pembiayaan Pembangunan Untuk Mendorong Pembangunan Kabupaten Bulungan				
17.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	Ukuran yang menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB dari Kemenpan & RB
		Nilai/Predikat SAKIP	Penilaian atas fakta objektif pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja	Hasil Evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		Opini BPK	Pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, yang didasarkan pada beberapa kriteria	Nilai Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah
		Nilai LPPD	Nilai atas Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah.	Penilaian Dari Kemendagri

		Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, dan berusaha menghindari, meminimalkan, atau bahkan menghilangkan risiko yang tidak dapat diterima.	Penilaian dari BPKP
		Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Level Maturitas SPIP terdiri dari enam tingkatan yaitu : 0 = Belum ada, 1 = Rintisan, 2 = Berkembang 3 = Terdefinisi, 4 = Terkelola & Terukur 5 = Optimum	Penilaian dari BPKP
		Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK)	Sebuah model pengukuran Efektivitas Pengendalian Korupsi di Instansi dan Badan Usaha Pemerintah dan sebuah upaya mengkuantifikasi kemajuan pengelolaan risiko korupsi di dalam organisasi serta memberikan pemahaman terkait dengan pencegahan, pengelolaan atau Pengendalian korupsi.	Penilaian dari KPK

		<p>Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah</p>	<p>Indek pengelolaan keuangan daerah adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tatakelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. 6 dimensi penilaian terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran;2. pengalokasin anggaran belanja dalam APBD, tranparansi pengelolaan keuangan daerah;3. penyerapan anggaran;4. kondisi keuangan daerah dan opini, Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD. <p>Indeks terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1. A = Baik2. B = Perlu Perbaikan3. C = Sangat perlu perbaikan	<p>Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran + Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD + Transparansi pengelolaan keuangan + Penyerapan anggaran + Kondisi keuangan Daerah + Opini BPK</p>
--	--	---	---	--

18.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.	$IKM = \frac{\text{Total nilai persepsi per unsur} \times \text{Nilai Penimbang}}{\text{Total Unsur Terisi}}$
-----	--	----------------------------	--	---

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



SUROSU, SE
Pembina TK.I/IVb
NIP. 197003101993031008